

Memutus Rantai Senioritas: Rekonstruksi Sistem Pengasuhan Pesantren yang Bebas dari Kekerasan

Suriawan Simanjuntak¹, Muhammad dani², Saninah Rahadatul 'Aisy³,

¹Sekolah DWI Tunggal Tanjung Morawa Deli Serdang Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³Dayah Perbatasan Manarul Islam Aceh Tamiang ,Indonesia

E-mail: suriawan@dwitunggal.ac.id ¹, muhammaddani@uinsu.ac.id ², saninah@gmail.com ³

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 10 Mei 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: *Pesantren, Sistem Pengasuhan, Budaya Senioritas, Kekerasan Asrama, Ramah Anak.*

Abstract

Pesantren secara historis memegang peran penting dalam pembentukan karakter moral generasi muda, namun reputasi luhur tersebut kerap kali tercoreng oleh maraknya kasus kekerasan fisik dan perundungan yang dipicu oleh budaya senioritas di lingkungan asrama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah bertahannya praktik intimidasi berbasis relasi kuasa di pesantren serta merumuskan model rekonstruksi sistem pengasuhan yang humanis dan aman bagi anak. Melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun dari berbagai dokumen regulasi resmi Kementerian Agama, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta literatur akademik terkait dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan adanya eskalasi kasus perundungan terstruktur akibat pelimpahan wewenang kedisiplinan yang berlebihan kepada santri senior pada area-area buta (*blind spot*) asrama, yang diperparah oleh adanya normalisasi budaya bungkam di kalangan junior dan kecenderungan institusi menutupi konflik demi menjaga nama baik. Pembahasan menyimpulkan bahwa pesantren harus melakukan reformasi tata kelola pengasuhan melalui pencabutan otoritas sanksi fisik oleh senior, pengetatan pengawasan formal, reorientasi peran senior menjadi mentor kolegal, serta penyediaan kanal pengaduan mandiri yang aman dan rahasia. Strategi rekonstruksi ini penting diimplementasikan guna menyelaraskan tradisi kepatuhan dengan prinsip perlindungan anak, sekaligus mengembalikan marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang anti-kekerasan.

PENDAHULUAN

Pesantren secara historis dikenal sebagai institusi pendidikan Islam *indigenous* yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter moral, spiritual, dan intelektual generasi bangsa. Di dalam ekosistemnya yang unik, santri tidak hanya diajarkan mengenai pemahaman teks-teks keagamaan secara mendalam, melainkan juga dididik untuk menginternalisasikan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, dan kepatuhan. Kehidupan komunal selama dua puluh empat jam di dalam asrama dirancang agar menjadi kawah candradimuka yang menumbuhkan kepekaan sosial serta kedisiplinan yang tinggi bagi para pembelajar.

Namun, di tengah reputasi luhur tersebut, wajah pendidikan pesantren kontemporer kerap kali tercoreng oleh maraknya kasus perundungan (*bullying*) fisik maupun psikologis yang berujung pada cedera serius bahkan kematian santri. Ruang asrama yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang aman dan penuh kasih sayang, dalam beberapa kasus bertransformasi menjadi arena kekerasan yang menakutkan bagi santri usia muda. Fenomena ini memicu keprihatinan publik yang mendalam karena bertolak belakang dengan esensi dasar ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (Sulasmono, 2023).

Akar masalah dari bertahannya praktik kekerasan ini sering kali bersumber dari budaya senioritas yang diwariskan dari generasi ke generasi di lingkungan asrama. Pelimpahan wewenang kedisiplinan yang terlalu besar dari pengasuh utama kepada santri senior menciptakan relasi kuasa yang sangat timpang dan rentan disalahgunakan. Atas nama penegakan aturan dan tradisi "ospek" informal, para senior kerap kali membenarkan tindakan intimidasi serta kekerasan fisik sebagai metode untuk mendidik mentalitas juniornya. Budaya patuh tanpa syarat yang diajarkan di lingkungan komunal membuat santri junior cenderung memilih bungkam ketika mengalami kekerasan karena takut mendapatkan sanksi sosial atau pengucilan yang lebih berat.

Dampak buruk dari normalisasi kekerasan berbasis senioritas ini tidak hanya merusak fisik korban, melainkan juga meninggalkan trauma psikologis mendalam yang dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menegaskan bahwa tingginya angka kekerasan di satuan pendidikan berbasis asrama keagamaan telah mencapai tingkat darurat yang membutuhkan intervensi mendesak (KPAI, 2024). Banyak santri yang akhirnya memutuskan keluar dari pesantren atau kehilangan motivasi belajar akibat tekanan mental yang tidak tertahankan. Lebih jauh lagi, budaya kekerasan ini menciptakan lingkaran setan, di mana korban perundungan hari ini berpotensi besar menjadi pelaku perundungan di masa depan ketika

mereka menduduki posisi sebagai senior.

Tantangan yang dihadapi oleh pesantren saat ini semakin dilematis karena adanya kecenderungan beberapa lembaga untuk menutupi kasus kekerasan internal demi menjaga nama baik institusi. Pola penyelesaian masalah yang bersifat kekeluargaan tanpa adanya tindakan tegas terhadap pelaku membuat efek jera gagal diwujudkan (Zuhdi, 2025). Di sisi lain, keterbatasan jumlah pengasuh formal jika dibandingkan dengan ribuan jumlah santri membuat pengawasan di titik-titik buta (*blind spot*) asrama menjadi sangat lemah. Akibatnya, penegakan disiplin yang diserahkan sepenuhnya kepada organisasi santri senior berjalan tanpa kontrol dan evaluasi yang ketat dari jajaran pengurus utama.

Pemerintah melalui Kementerian Agama sebenarnya telah berupaya melakukan mitigasi hukum dengan menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan keagamaan untuk menghadirkan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah formal ini mencakup ancaman pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan siber maupun fisik di lingkungan asrama. Namun, efektivitas regulasi makro ini sering kali membentur dinding resistensi kultural di lapangan karena kuatnya anggapan bahwa hukuman fisik merupakan bagian dari metode "*ta'dib*" atau pendidikan karakter yang sah dalam tradisi pengasuhan pesantren tradisional (Fadhilah, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan rekonstruksi sistem pengasuhan yang mampu menurunkan tensi budaya senioritas menjadi hubungan interpersonal yang humanis dan emansipatif. Jargon pembenaran kekerasan untuk melatih mental santri harus segera dihapus dan diganti dengan model pengasuhan berbasis pendekatan psikologi perkembangan anak. Nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan lewat kitab-kitab klasik harus diejawantahkan secara nyata dalam struktur tata tertib asrama, sehingga penegakan disiplin tidak lagi diidentikkan dengan pukulan, bentakan, atau penyiksaan fisik.

Melihat bentangan problem yang begitu kompleks dan darurat tersebut, penelitian mengenai rekonstruksi sistem pengasuhan pesantren menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan. Alasan pertama adalah kebutuhan mendasar untuk merumuskan ulang cetak biru manajemen pengasuhan di lingkungan pendidikan agama berbasis asrama. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pesantren hanya berfokus pada efektivitas kurikulum pembelajaran kitab kuning atau manajemen keuangan, sementara kajian mendalam mengenai mitigasi kekerasan struktural berbasis senioritas masih sangat minim ditemukan (Raharjo & Utami, 2024).

Alasan kedua terkait dengan kebutuhan mendesak para pengelola pesantren terhadap panduan praktis yang dapat memitigasi tindakan perundungan secara sistematis di dalam asrama.

Terdapat kekosongan literatur yang mampu menjembatani regulasi formal pemerintah mengenai perlindungan anak dengan implementasi harian pembina asrama untuk mengontrol relasi antara senior dan junior (Nugroho, 2025). Melalui penelitian ini, celah teoretis dan aplikatif tersebut akan diisi dengan memformulasikan model pengasuhan kolegal-humanis, teknik pengawasan berlapis, serta reformasi mekanisme pemberian sanksi pelanggaran yang bebas dari kekerasan fisik.

Pada akhirnya, penelitian ini penting dilakukan demi menyelamatkan masa depan generasi muda serta menjaga kesucian marwah pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fidin* yang teduh dan mengayomi. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi strategi tata kelola yang aman bagi anak, sekaligus mengembalikan hakiki pesantren sebagai ruang perlindungan moral yang humanis. Dengan demikian, pesantren dapat terus eksis di era modern sebagai institusi pendidikan teladan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, melainkan juga menjadi pelopor dalam penegakan nilai kemanusiaan yang anti-kekerasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Sari & Asmendri, 2020). Pendekatan ini dipilih secara sengaja karena fokus utama kajian berpusat pada penelaahan teks, konseptualisasi teoretis, serta rekonstruksi model manajemen pengasuhan pesantren yang bebas dari kekerasan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat mengurai fenomena senioritas dan relasi kuasa di lingkungan asrama secara mendalam melalui kritik teks dan sintesis dokumen kebijakan. Secara metodologis, penggunaan studi kepustakaan dinilai lebih aman dan efektif untuk merumuskan cetak biru strategi pengasuhan baru yang bersifat konseptual-aplikatif tanpa harus terkendala oleh sensitivitas akses data lapangan di institusi keagamaan.

Guna menghasilkan analisis ilmiah yang kredibel dan memiliki otoritas akademik, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari dokumen regulasi normatif resmi, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan keagamaan serta buku panduan resmi pengasuhan santri. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan kritis terhadap literatur pendukung yang memiliki relevansi tematik tinggi, meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks psikologi perkembangan anak, serta laporan rilis data empiris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2024). Pengombinasian kedua rumpun data ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan berpijak pada regulasi formal sekaligus

diperkuat oleh temuan teoretis sosiologi pendidikan mutakhir.

Prosedur pengumpulan data dijalankan secara sistematis melalui teknik dokumentasi yang berbasis pada metode penelusuran pustaka secara digital (*digital library search*) pada beberapa basis data akademik, seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus. Proses penelusuran literatur dioperasikan menggunakan kata kunci spesifik dan operator boolean yang relevan, seperti "manajemen pengasuhan pesantren", "kekerasan senioritas asrama", dan "pesantren ramah anak". Peneliti menerapkan kriteria inklusi yang ketat dalam memilih referensi, yaitu dokumen yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir guna menjamin aspek kebaruan (*novelty*) data, serta mengeksklusi artikel kepustakaan yang tidak membahas dimensi relasi kuasa atau sistem pengasuhan asrama.

Setelah seluruh data kepustakaan yang relevan berhasil dikumpulkan, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan logika interpretasi kontekstual (Moleong, 2010). Proses analisis data ini dijalankan secara bertahap melalui tiga fase mekanis model interaktif, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, peneliti melakukan pemilahan terhadap data mentah untuk menyaring informasi yang tidak relevan dengan fokus rekonstruksi pengasuhan. Selanjutnya, data yang telah disaring dikelompokkan ke dalam dimensi taktis reformasi budaya asrama, yang kemudian dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan berupa narasi komprehensif mengenai strategi mengubah budaya senioritas menjadi hubungan interpersonal yang humanis.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*) serta menghindari bias subjektivitas peneliti, diterapkan teknik triangulasi sumber data (Arianto, 2024). Proses triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan, menguji silang, dan mengonfrontasikan isi berbagai dokumen kepustakaan dari perspektif penulis yang berbeda, seperti memadukan sudut pandang sosiolog pendidikan dengan ahli psikologi anak. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data statistik perundungan yang disajikan oleh lembaga resmi guna memastikan akurasi data fenomena yang diangkat. Melalui mekanisme validasi yang berlapis ini, hasil sintesis kepustakaan dalam artikel ini diharapkan dapat mencapai tingkat pemahaman yang objektif, mendalam, dan komparatif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelusuran dokumen regulasi dan laporan perlindungan anak menunjukkan adanya eskalasi kasus kekerasan di lingkungan asrama yang berpangkal dari tata kelola pengasuhan yang

kurang terkontrol. Pola kekerasan yang terjadi di dalam pesantren tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur akibat adanya pewarisan budaya senioritas yang tidak tertulis di antara generasi santri.

Data empiris dari rilis resmi lembaga pengawas anak mengonfirmasi bahwa sebagian besar tindakan perundungan fisik dan psikologis terjadi di area kamar tidur dan kamar mandi asrama. Titik-titik ini menjadi area buta (*blind spot*) yang luput dari jangkauan pengawasan pengurus formal pada jam-jam rawan, khususnya selepas aktivitas mengaji malam hari.

Ditemukan bahwa salah satu pemicu utama langgengnya praktik intimidasi adalah adanya pelimpahan wewenang penegakan disiplin yang berlebihan dari jajaran pengasuh kepada organisasi santri senior. Pembagian tugas ini sering kali tidak disertai dengan panduan batasan sanksi yang jelas, sehingga senior menerjemahkan hukuman disiplin dalam bentuk kontak fisik.

Hasil analisis terhadap dokumen internal pesantren memperlihatkan adanya normalisasi budaya bungkam di kalangan santri junior yang menjadi korban kekerasan. Junior menganggap tindakan kasar dari senior sebagai bagian dari proses ujian mental yang harus dilewati, sekaligus takut melapor karena adanya ancaman pengucilan sosial dari komunitas asrama.

Terkait aspek kelembagaan, potret manajemen pengasuhan menunjukkan adanya ketimpangan yang besar antara rasio jumlah pembina asrama dengan jumlah santri yang menetap. Seorang pembina asrama sering kali harus mengawasi ratusan santri sekaligus, yang menyebabkan kontrol personal terhadap perubahan perilaku psikologis santri menjadi sangat lemah.

Fakta di lapangan juga mengidentifikasi bahwa pola penyelesaian kasus kekerasan oleh pihak pengelola cenderung diselesaikan secara tertutup melalui mekanisme kekeluargaan. Pendekatan ini mengutamakan perlindungan terhadap nama baik institusi pesantren di mata publik, namun sering kali mengabaikan hak pemulihan trauma psikologis jangka panjang yang dialami oleh korban.

Hasil penelusuran dokumen kurikulum kedisiplinan menunjukkan bahwa konsepsi pendisiplinan santri masih kuat dipengaruhi oleh pemahaman kaku terhadap metode hukuman fisik konvensional. Guru atau pengurus asrama masih memandang bentakan dan hukuman fisik ringan sebagai bentuk instrumen edukasi (*ta'dib*) yang sah untuk membentuk karakter islami.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya respons positif berupa penerbitan keputusan regulasi anti-kekerasan oleh sebagian pengurus pesantren modern sebagai langkah awal mitigasi hukum. Regulasi baru ini mulai mencantumkan larangan tegas terhadap kontak fisik dalam sanksi kedisiplinan, walaupun implementasinya di tingkat akar rumput asrama masih menghadapi resistensi kultural.

Data rilis psikologi anak di lingkungan asrama mencatat adanya dampak penurunan motivasi belajar dan peningkatan kecemasan akademik yang signifikan pada santri korban perundungan. Sebagian besar kasus santri yang kabur atau meminta pindah dari pesantren berakar dari akumulasi tekanan mental akibat perundungan verbal maupun fisik dari seniorinya.

Laporan kepustakaan juga mendeteksi adanya potensi perubahan peran sosiologis, di mana korban perundungan hari ini memiliki kecenderungan besar untuk mengulangi pola kekerasan yang sama ketika mereka naik tingkat menjadi senior. Siklus balas dendam antargenerasi ini menjadi faktor utama mengapa tradisi kekerasan senioritas di lingkungan pesantren sangat sulit diputus.

PEMBAHASAN

Kerapatan sistem pertahanan moral pesantren yang mulai longgar di era modern memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan pendidikan Islam. Fenomena kekerasan yang dibungkus atas nama penegakan disiplin senioritas secara perlahan mengaburkan esensi pesantren sebagai tempat penyemaian akhlakul karimah yang penuh kasih sayang (Sulasmono, 2023). Relasi kuasa yang timpang di dalam asrama memaksa santri junior tunduk pada aturan informal yang destruktif bagi perkembangan mental mereka.

Budaya senioritas yang marak di lingkungan asrama keagamaan nyata-nyata mengeksploitasi kepatuhan buta santri demi melanggengkan tradisi intimidasi antargenerasi. Ketika tindakan kekerasan fisik dinormalisasi sebagai metode melatih mental, kohesi sosial dan kenyamanan psikologis di dalam ekosistem pesantren akan mengalami keretakan yang akut (KPAI, 2024). Pengurus tidak boleh lagi berlindung di balik jargon nama baik lembaga untuk menjustifikasi pembiaran terhadap konflik relasi kuasa tersebut.

Kesenjangan antara regulasi ramah anak yang diterbitkan pemerintah dengan praktik pengasuhan riil di lapangan memerlukan rekonstruksi strategi tata kelola asrama secara menyeluruh. Model pendisiplinan yang mengandalkan hukuman fisik dan intimidasi verbal terbukti tidak lagi relevan dan justru melahirkan trauma psikologis yang mendalam bagi santri (Fadhilah, 2024). Pesantren harus segera mengubah paradigma pengasuhannya dari model pengawasan yang represif menjadi model pendampingan yang persuasif.

Formulasi strategi taktis pertama yang mendesak untuk diterapkan adalah melakukan reformasi struktural terhadap organisasi santri senior dengan mencabut wewenang pemberian sanksi fisik. Pengurus pesantren wajib mengambil alih otoritas kedisiplinan secara penuh dan menetapkan batasan hukum yang jelas bagi pelanggaran aturan di asrama (Nugroho, 2025).

Langkah ini penting untuk memutus rantai penyalahgunaan relasi kuasa yang selama ini mengakar di kalangan pelajar senior.

Langkah taktis kedua berkaitan erat dengan restrukturisasi sistem pengawasan asrama melalui pemanfaatan teknologi dan pembagian zona aman santri. Kelemahan pengawasan pada area-area buta asrama harus diatasi dengan peningkatan patroli berkala oleh pembina formal serta pelibatan aktif psikolog anak dalam memantau dinamika sosial santri (Zuhdi, 2025). Penguatan kontrol ini akan mempersempit ruang terjadinya perundungan terselubung di lingkungan komunal.

Selanjutnya, rekonstruksi budaya asrama harus diarahkan pada pembentukan model pengasuhan kolegiel-humanis yang menempatkan senior sebagai pelindung dan mentor bagi juniornya. Nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah* dan akhlak luhur yang diajarkan dalam kitab suci harus diejawantahkan ke dalam program kerja harian asrama yang inklusif (Raharjo & Utami, 2024). Pendekatan humanis ini akan mengubah atmosfer asrama menjadi ruang belajar yang saling mendukung dan bebas dari rasa takut.

Dimensi taktis terakhir yang mengunci keberhasilan reformasi ini adalah penyediaan ruang pengaduan mandiri yang aman dan rahasia bagi santri korban kekerasan. Sistem proteksi ini diperlukan untuk meruntuhkan tembok budaya bungkam sehingga korban atau saksi perundungan berani bersuara tanpa takut mendapatkan intimidasi lanjutan (KPAI, 2024). Keterbukaan informasi internal ini menjadi kunci utama bagi manajemen untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran moral di asrama.

Secara teoretis, integrasi transformatif antara konsep pendidikan karakter berbasis kasih sayang dan manajemen perlindungan anak akan melahirkan ekosistem pesantren yang sangat kokoh dan adaptif zaman (Zuhdi, 2025). Melalui kombinasi strategi mikro-pedagogis yang humanis ini, pesantren tidak hanya berhasil menyelamatkan keselamatan fisik dan mental para santri, tetapi juga mampu mengembalikan marwah luhurnya sebagai lembaga pendidikan Islam teladan yang anti-kekerasan.

KESIMPULAN

Rekonstruksi sistem pengasuhan di lingkungan pesantren bukan lagi sekadar wacana manajerial, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan yang mendesak demi menjaga keselamatan fisik, mental, dan masa depan para santri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi perundungan dan kekerasan fisik yang selama ini bertahan di lingkungan asrama berakar dari adanya normalisasi budaya senioritas serta pelimpahan wewenang kedisiplinan yang tidak terkontrol. Model pengawasan konvensional yang represif serta

kecenderungan institusi untuk menutupi kasus internal terbukti gagal memutus siklus balas dendam antargenerasi santri, sekaligus menciptakan benturan laten terhadap regulasi perlindungan anak yang berlaku.

Guna memutus rantai kekerasan struktural tersebut, tata kelola manajemen pesantren harus bertransformasi secara radikal menuju sistem pengasuhan yang kolegal-humanis. Keberhasilan reformasi ini bertumpu pada langkah-langkah taktis yang terintegrasi, meliputi: pencabutan otoritas pemberian sanksi fisik oleh organisasi santri senior, penguatan sistem pengawasan pada area-area buta asrama oleh pengasuh formal, reorientasi peran senior menjadi mentor yang mengayomi, serta penyediaan kanal pengaduan mandiri yang aman dan rahasia bagi korban. Pendisiplinan santri tidak boleh lagi mengandalkan intimidasi verbal atau hukuman fisik, melainkan harus dikembalikan pada esensi pendidikan karakter berbasis kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Melalui komitmen rekonstruksi pengasuhan yang humanis ini, pesantren diharapkan mampu menghapus stigma negatif dan kembali meneguhkan jati dirinya sebagai institusi pendidikan Islam yang teladan. Hasil kajian ini memberikan kontribusi praktis berupa cetak biru tata kelola asrama yang aman bagi anak, sekaligus membantu para pengelola pesantren dalam menyelaraskan tradisi kepatuhan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pesantren dapat terus eksis sebagai benteng moral bangsa yang tidak hanya melahirkan generasi yang unggul dalam pemahaman agama, tetapi juga kokoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang anti-kekerasan.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, K., & Shofiyah, S. (2023). Relasi kuasa dan normalisasi kekerasan di lembaga pendidikan berbasis asrama: Studi sosiologis siber-kultural. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 14(2), 189-204.
- Arianto, B. (2024). Metode penelitian kepustakaan digital dalam studi islam kontemporer. *Jurnal Metodologi Agama*, 12(1), 45-60.
- Asrori, M., & Thohir, M. (2024). Desain manajemen pengasuhan inklusif: Upaya preventif kekerasan fisik dan verbal di pondok pesantren. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Islam*, 6(1), 76-92.
- Aziz, A., & Baharuddin, B. (2025). Implementasi regulasi ramah anak dan tantangan kultural pengasuhan tradisional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 12(2), 145-160.
- Fadhilah, N. (2024). Konsep ta'dib vs kekerasan fisik: Dilema metode pendisiplinan di satuan pendidikan tradisional. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 5(2), 88-101.
- Fathurrahman, M. (2023). Transformasi budaya organisasi santri senior dalam memutus rantai perundungan di asrama keagamaan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 9(3), 210-226.
- Hayati, N., & Rosadi, K. (2025). Peran konselor siber dan psikolog anak dalam memitigasi trauma korban *bullying* di institusi komunal. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 11(1), 33-48.
- Ilyas, M., & Munir, A. (2024). Analisis viktimologi terhadap fenomena budaya bungkam santri junior dalam pusaran kekerasan asrama. *Lentera: Jurnal Hukum dan Sosial*, 16(2), 112-127.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perlindungan anak di satuan pendidikan berbasis asrama*. KPAI.
- Maimun, M., & Fitri, A. (2026). Dekonstruksi kurikulum kedisiplinan pesantren melalui pendekatan psikologi perkembangan anak. *Jurnal Edukasi Religius*, 10(1), 45-59.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, R. (2025). Mengurai titik buta (*blind spot*) pengawasan asrama: Evaluasi manajemen pengasuh formal di lembaga pesantren modern. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 201-216.
- Nugroho, A. (2025). Sinkronisasi regulasi ramah anak pada manajemen pondok pesantren modern. *Journal of Islamic Education Review*, 11(1), 45-59.
- Prasetyo, D., & Utomo, S. (2024). Dampak agresi verbal senioritas terhadap kecemasan akademik dan motivasi belajar santri. *Jurnal Psikologi Keagamaan*, 7(3), 154-169.

- Raharjo, S., & Utami, T. (2024). Menakar celah riset pesantren: Urgensi penguatan sistem pengasuhan non-kekerasan. *Jurnal Edukasi Religius*, 8(3), 140-155.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian tindakan kelas bimbingan konseling. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 41-51.
- Sulasmono, B. (2023). Fenomena kekerasan asrama: Mengurai problem relasi kuasa santri senior dan junior. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(2), 201-215.
- Suyanto, T., & Lestari, P. (2025). Rekonstruksi model pengasuhan kolejal-humanis sebagai alternatif penegakan disiplin santri bebas kekerasan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 18(1), 12-29.
- Zainuddin, M., & Qosim, M. (2024). Hak pemulihan trauma psikologis korban perundungan dalam sistem penyelesaian hukum internal keagamaan. *Jurnal Keadilan Sosial*, 5(2), 99-114.
- Zuhdi, M. (2025). Akuntabilitas lembaga keagamaan dalam penanganan kasus hukum internal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 12-27.